

RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia

AKD: RUU Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang
Tentara Nasional Indonesia

Bulan: Agustus 2020

Oleh:

GAMBAR

PERPUSTAKAAN DPR RI

Telepon : (021) 5715876, 5715817, 5715887

Fax : (021) 5715846

e-mail: perpustakaan@dpr.go.id

Web: perpustakaan.dpr.go.id

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) mengatur bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional. TNI adalah tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Sebagai tentara rakyat, anggota TNI berasal dari warga negara Indonesia; sebagai tentara pejuang, TNI berjuang menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya; sebagai tentara nasional, TNI adalah tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama; dan sebagai tentara profesional, TNI terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, sehingga mahir menggunakan peralatan militer, mahir bergerak, mahir menggunakan alat tempur, serta mampu melaksanakan tugas secara terukur dan memenuhi nilai-nilai akuntabilitas, tentara profesional juga tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Dengan profesionalitasnya, TNI di samping memiliki kemampuan untuk melaksanakan peran, fungsi, dan tugas pokoknya baik dalam melaksanakan operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, TNI juga memiliki kekuatan dan kemampuan yang dapat membantu kementerian dan lembaga lain guna menyelesaikan permasalahan dalam dinamika pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang memerlukan kemampuan TNI di luar bidang pertahanan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Pasal 47 ayat (2) UU TNI diatur bahwa prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan pada sepuluh kantor kementerian/lembaga, yakni kantor yang membidangi kooordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Badan Narkotika Nasional dan Mahkamah Agung. Akan tetapi dihadapkan pada kondisi yang semakin berkembang serta dibutuhkan kemampuan dari prajurit TNI aktif diluar sepuluh kementerian/lembaga tersebut maka diperlukan penyesuaian norma UU TNI terkait dengan penempatan instansi pusat tertentu yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif.

Di samping itu, perubahan atas UU TNI pun perlu dilakukan terhadap ketentuan yang mengatur mengenai batas usia pensiun bagi bintangara dan tamtama dalam melaksanakan dinas keprajuritan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 UU TNI. Perubahan atas ketentuan yang mengatur mengenai usia paling tinggi bagi bintangara dan tamtama dalam melaksanakan dinas keprajuritan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 UU TNI. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (UU Kepolisian) usia pensiun pegawai adalah 58 tahun. Berdasarkan data bahwa peningkatan usia produktif sampai dengan usia 60 tahun dan angka harapan hidup masyarakat Indonesia sampai dengan usia laki-laki 73,06 tahun dan perempuan 69,16 tahun. Kesetaraan usia pensiun Bintangara dan Tamtama TNI dengan ASN/Polri pada golongan yang sama di Kepolisian dan K/L lainnya dilaksanakan untuk memberikan kesejahteraan bagi prajurit, sehingga perlu adanya penyesuaian batas usia pensiun bagi prajurit TNI.

JENIS	KETERANGAN	URL
Berita	Anggota DPR Sebut Pembahasan Perpres Pelibatan TNI Tangani Terorisme Bisa Lintas Komisi	https://nasional.kompas.com/read/2020/08/11/13294361/anggota-dpr-sebut-pembahasan-perpres-pelibatan-tni-tangani-terorisme-bisa
Berita	DPR Diminta Cermat Bahas Perpres Pelibatan TNI Tangani Terorisme	https://mediaindonesia.com/read/detail/335125-dpr-diminta-cermat-bahas-perpres-pelibatan-tni-tangani-terorisme
Berita	Dwifungsi TNI, Ketika Peran Ganda Tentara Kembali	https://grafis.tempo.co/read/1585/dwifungsi-tni-ketika-peran-ganda-tentara-kembali
Berita	Hati-Hati Tumpang-tindih Tangani Teroris	https://mediaindonesia.com/read/detail/313475-hati-hati-tumpang-tindih-tangani-teroris
Berita	Ketua Komisi I DPR Nilai Pelibatan TNI Atasi Terorisme Sesuai UU	https://nasional.kompas.com/read/2020/08/10/11480811/ketua-komisi-i-dpr-nilai-pelibatan-tni-atasi-terorisme-sesuai-uu
Berita	Pelibatan TNI dalam Terorisme Bahayakan HAM	https://mediaindonesia.com/read/detail/316359-pelibatan-tni-dalam-terorisme-bahayakan-ham
Berita	Pelibatan TNI di Penanganan Terorisme bukan Operasi Militer	https://mediaindonesia.com/read/detail/313074-pelibatan-tni-di-penanganan-terorisme-bukan-operasi-militer
Berita	Pelibatan TNI di Terorisme tidak Tepat	https://mediaindonesia.com/read/detail/316930-pelibatan-tni-di-terorisme-tidak-tepat
Berita	Pelibatan TNI Dilakukan Selektif	https://mediaindonesia.com/read/detail/317802-pelibatan-tni-dilakukan-selektif
Berita	Pelibatan TNI Hadapi Terorisme akan Rusak Desain TNI dan Polri	https://mediaindonesia.com/read/detail/335131-pelibatan-tni-hadapi-terorisme-akan-rusak-desain-tni-dan-polri
Berita	Pelibatan TNI Tangani Terorisme Harus Berdasarkan Undang-Undang	https://mediaindonesia.com/read/detail/335381-pelibatan-tni-tangani-terorisme-harus-berdasarkan-undang-undang
Berita	Pemerintah Diminta Harmonisasi Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme	https://nasional.kompas.com/read/2020/08/10/14591891/pemerintah-diminta-harmonisasi-perpres-pelibatan-tni-atasi-terorisme
Berita	Perlu Sinergitas TNI dan Polri dalam Penanggulangan Terorisme	https://mediaindonesia.com/read/detail/326416-perlu-sinergitas-tni-dan-polri-dalam-penanggulangan-terorisme
Berita	Pro dan Kontra Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Terorisme	https://nasional.kompas.com/read/2020/08/11/09512211/pro-dan-kontra-pelibatan-tni-dalam-pemberantasan-terorisme
Berita	Rancangan Perpres Pelibatan TNI Berantas Terorisme Dikritik	https://nasional.kompas.com/read/2020/08/04/06374591/rancangan-perpres-pelibatan-tni-berantas-terorisme-dikritik
Berita	Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur	https://fokus.tempo.co/read/1058134/reformasi-tni-di-masa-presiden-jokowi-dinilai-berjalan-mundur
Berita	TNI Atasi Terorisme Perlu Putusan Politik	https://mediaindonesia.com/read/detail/317492-tni-atasi-terorisme-perlu-putusan-politik

Jurnal	Keterlibatan Militer Dalam Kancah Politik di Indonesia	http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1574/1301
Jurnal	Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme di Indonesia	http://ejournal.politik.lipi.gov.id/index.php/jpp/article/view/715
Jurnal	Pengaruh Modernisasi Alat Utama Sistem Pertahanan Batalyon Bekang Terhadap Kesiapan Dukungan Logistik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat	http://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/view/636
Jurnal	Prajurit Profesional-Patriot: Menuju TNI Profesional pada Era Reformasi	https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://journal.ui.ac.id/index.php/mjs/article/download/4704/3303&ved=2ahUKEwi5yfHWhMrrAhXTdCsKHY5AhATEQFjAAegQICxAC&usq=AOvVaw2OndXlxVgyoNhY-TzkEcwYc
Jurnal	Studi Kritis Konsep dan Aplikasi Pembinaan Mental TNI AD	https://ojs.unida.ac.id/index.php/JSH/article/view/489
Buku	Dukungan dan Kendala-kendala dalam Menciptakan Supremasi Sipil Terhadap Militer Di Era Reformasi Politik: Studi Kasus Wewenang Pemberian Persetujuan DPR Hasil Pemilu 1999 Terhadap Proses Pengangkatan Panglima TNI oleh Presiden	http://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&id=269&n59&keywords=Tentara+Nasional+Indonesia
Buku	Hegemoni Tentara	http://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&id=104&n56&keywords=Tentara
Buku	Komando Tutorial dan Budaya Politik TNI dalam Era Reformasi	http://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&id=256&n23&keywords=Tentara+Nasional+Indonesia
Buku	Langkah-Langkah Perjuangan Kita	http://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&id=167&n78&keywords=Tentara
Buku	Memperkuat Tentara Nasional Indonesia	http://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&id=166&n46&keywords=Tentara+Nasional+Indonesia
Buku	Memperkuat Tentara Nasional Indonesia	http://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&id=166&n46&keywords=Tentara
Buku	Pergolakan Politik Tentara	http://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&id=166&n90&keywords=Tentara
Buku	Profesionalisme Militer: Profesionalisasi TNI	http://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&id=303&n63&keywords=Tentara+Nasional+Indonesia
Buku	Profesionalisme TNI di Tengah Perubahan Politik Pasca 1998	http://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&id=271&n19&keywords=Tentara
Buku	Reformasi TNI: Perspektif Baru Hubungan Sipil-Militer di Indonesia	http://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&id=260&n27&keywords=Tentara+Nasional+Indonesia
Buku	Tentara Mendamba Mitra	http://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&id=113&n35&keywords=Tentara
Buku	TNI Adalah Rakyat, Rakyat Adalah TNI	http://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&id=303&n02&keywords=Tentara+Nasional+Indonesia
Buku	TNI Bukan Tentara Rakyat	http://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&id=166&n97&keywords=Tentara

Buku	TNI di Era Perubahan	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=140\n25&keywords=Tentara
Buku	TNI – Polri di Masa Perubahan Politik	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=256\n55&keywords=Tentara+Nasional+I\nndonesia
Buku	Wawancara Tentang Tentara dan Politik	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=167\n16&keywords=Tentara
Dokumen	Hasil Penyelarasan Naskah Akademik RUU Tentang Perubahan Atas UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia	https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tni.pdf
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 85 Tahun 2014 Tentang Tenaga Profesi Prajurit Tentara Nasional yang Bertugas di Luar Institusi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia	https://www.kemhan.go.id/kuath\nan/wp-content/uploads/2017/02/\nPeraturan-Menteri-Pertahanan-N\nomor-85-Tahun-2014-tentang-Ten\naga-Profesi-Prajurit-TNI-yang-\nBertugas-di-luar-Institusi-Kem\nhan-dan-TNI.pdf
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia	http://www.bphn.go.id/data/documents/10pp039.pdf
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 63 Tentang Cadangan Nasional	https://peraturan.bpk.go.id/Ho\nme/Download/62807/pp%20no%2005\n1%20tahun%201963.pdf
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Presiden RI Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Tentara Nasional Indonesia	https://sipuu.setkab.go.id/PUU\nndoc/175864/Perpres_Nomor_37_Ta\nhun_2019.pdf
Undang-undang & Peraturan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer	https://translate.google.com/t\nranslate?hl=en&sl=id&u=https:/\n/peraturan.bkpm.go.id/jdih/use\nrfiles/batang/UU%252025%252020\n14%2520HUKUM%2520DISIPLIN%2520\nMILITER.pdf&prev=search&pto=au\nne
Undang-undang & Peraturan	Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia	http://www.dpr.go.id/dokblog/d\nokumen/F_20150616_4760.PDF